

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mempengaruhi perubahan-perubahan hampir dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam tatanan pengelolaan pemerintah. Sistem pemerintahan negara kita mengalami perubahan yang drastis dan fundamental yaitu sentralisasi menjadi desentralisasi. Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2010 tentang Standar Akuntabilitas Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP, Lampiran I: par. 35-40) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (*timeliness*). Laporan keuangan memenuhi karakteristik andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta diversifikasi. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatanwaktuan penyajiannya agar berguna dalam pengambilan keputusan.

Demi terselenggaranya keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Kualitas Informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional (Hullah, *et al* 2012). Teknologi informasi selain teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Indriasari *et al* 2008). Keseluruhan aktivitas organisasi pemerintah akan terlaksana, apabila dilakukan secara integral dengan pengendalian sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan organisasi tercapai. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, ditambah pemanfaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu dan memperlancar proses keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Selain itu diperlukan pengendalian internal yang efektif dan efisien. Apabila informasi keuangan tersebut tidak disajikan secara andal dan tepat waktu, akan menyebabkan informasi kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan (Amey *et al* dalam Rosalin *et al*, 2011).

Ketepatanwaktuan dan keterandalan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan ketepatanwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus diiringi dengan

mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*) atau keterandalan. Jadi terdapat saling korban (*trade-off*) antara ketepatanwaktuan dan keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan. Namun, berkurangnya reliabilitas berakibat berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mempercepat ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi reliabilitas secara material. Dengan begitu ketepatanwaktuan dengan aproksimasi justru akan meningkatkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Zuliarti, 2012).

Faktor pertama yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Zuliarti, 2012). Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting

Faktor kedua yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan

dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Untuk itu dalam rangka akuntabilitas setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Darise, 2009).

Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah, dimana fungsi sistem pengendalian intern adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif. Menurut Romney *et al.* (2015) salah satu dari kekuatan pengendalian terbesar adalah kejujuran pegawai; salah satu kelemahan pengendalian terbesar adalah ketidakjujuran pegawai. Kebijakan sumber daya manusia dan praktik-praktik yang mengatur kondisi kerja, insentif pekerjaan dan kemajuan karier dapat menjadi kekuatan dalam mendorong kejujuran, efisiensi dan layanan yang loyal. Kebijakan sumber daya manusia harus berisi tingkatan keahlian yang diperlukan, perilaku etis dan integritas yang diperlukan. Selanjutnya didalam era globalisasi saat ini hal yang tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan teknologi informasi bagi organisasi organisasi baik swasta maupun pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan organisasi dengan alasan sebagai berikut:

- a. meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen,
- b. adanya pengaruh ekonomi internasional (globalisasi),
- c. perlunya waktu tanggap (*respons time*) yang lebih cepat,
- d. tekanan akibat dari persaingan bisnis.

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, adanya kenaikan opini merupakan adanya perbaikan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Opini tidak memberikan pendapat (TMP), artinya auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa karena dua alasan, yaitu auditor terganggu independensinya dan auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu. Opini wajar dengan pengecualian (WDP), bahwa laporan keuangan yang diperiksa sebagian besar pos dalam laporan keuangan, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan untuk pos-pos tertentu disajikan secara tidak wajar.

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini WTP artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Opini WTP dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP) diberikan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga

pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Fenomena yang terjadi saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berhasil mendapatkan hasil opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pertama kalinya sejak lima tahun terakhir oleh BPK-RI. Sebelumnya selama lima tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selalu mendapatkan opini audit WDP (Wajar Dengan Pengecualian) oleh BPK. Opini WTP hanya bisa dicapai oleh pemerintah daerah selaku pengelola keuangan daerah, jika memenuhi kategori yang telah ditetapkan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang digunakan oleh BPK-RI. Harapannya, seluruh satuan kerja perangkat daerah selalu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mempertimbangkan Opini WTP dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah di masa mendatang (Bandarlampung.bpk.co.id).

Berdasarkan fenomena diatas penulis mengambil pemilihan lokasi penelitian pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan karena atas keberhasilan untuk pertama kalinya selama 5 (lima) tahun terakhir ini maka penulis ingin mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada lima tahun terakhir mengalami penurunan sehingga atas keberhasilannya mendapat opini WTP pemerintah daerah Lampung Selatan mampu mempertahankan opini dari BPK tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung selatan karena selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pemerintah daerah Kabupaten Lampung selatan terus mengalami penurunan tingkat opini laporan keuangan daerah yang diberikan oleh BPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung selatan belum memadai yang disebabkan karena lemahnya system pengendalian intern pemerintah, belum optimalnya

pemanfaatan teknologi informasi dan belum memadainya kompetensi sumber daya manusia. Selain itu belum menginternalisasi perencanaan implementasi SAP berbasis akrual dan terdapat regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual yang belum selaras dengan peraturan lainnya. Kebijakan dan sistem akuntansi belum seluruhnya diimplementasikan, pemuktahiran database SDM belum optimal juga tidak melaksanakan analisis kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk setiap hari dan fungsi. Ambar juga menyebutkan SDM pengelola keuangan aset dan Teknologi Informasi belum semua memiliki kompetensi, bahkan optimalisasi pengelola keuangan, aset TI belum memadai.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2009) pada Pemerintah Daerah Subosukawonosraten. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2009) dalam model pertama dengan *path analysis* menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi. Sedangkan hasil penelitian dalam model kedua dengan uji regresi menunjukkan adanya pengaruh positif tidak signifikan antara sumber daya manusia, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada hipotesis penelitian yang pada penelitian terdahulu hanya terdapat 4 (empat) hipotesis sedangkan dalam penelitian ini terdapat 8 (delapan) hipotesis penelitian. Serta adanya perbedaan alat uji yaitu pada penelitian terdahulu alat uji menggunakan SPSS sedangkan dalam penelitian ini alat uji menggunakan PLS (*Partial Least Square*). Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengambil judul “Pengaruh Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Lampung Selatan).

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi, studi dilakukan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota/kabupaten Lampung selatan).

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Lampung Selatan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Lampung Selatan?
3. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Lampung Selatan?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Lampung Selatan?
5. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi?
6. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi?
7. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi?

8. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Lampung Selatan.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Lampung Selatan.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Lampung Selatan.
4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Lampung Selatan.
5. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi.
6. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi.
7. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi.
8. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian dan juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi IBI Darmajaya. Serta dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pihak yang terkait yaitu bagian akuntansi keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya Kabupaten Lampung Selatan.

1.5.2 Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan, bahan referensi, dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini dan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu akuntansi, khususnya konsentrasi akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan kinerja sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menggunakan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, mengenai apa saja populasi dan sampel yang digunakan, apakah jenis dan sumber data yang digunakan, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa yang dilakukan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN